

Analisis Responsivitas Penerimaan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Pengurangan Kemiskinan Di Kota Lhokseumawe

Busra^{1*}, Yulianisah², Diana³, Yeny Irawan⁴, Syarifudin⁵
 (1,2,3,4.) Politeknik Negeri Lhokseumawe
^{1*}busra@pnl.ac.id

Abstrak--Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah adanya alokasi anggaran untuk penyediaan barang publik yang berimplikasi meningkatnya pendanaan pemerintah daerah terhadap pembangunan di masing – masing daerah. Namun dalam praktiknya, desentralisasi tak jarang melahirkan berbagai persoalan di daerah. Permasalahan serius adalah masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dari sisi aspek keuangan. Penelitian ini bertujuan, pertama untuk mengukur tingkat responsivitas penerimaan pendapatan asli daerah, dalam penelitian ini pendapatan asli daerah adalah semua pendapatan yang diterima selain transfer dari pemerintah pusat yaitu pajak daerah, retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, pendapatan lain yang sah serta ZIS . Kedua, mengukur kemandirian daerah yaitu tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat dalam sisi fiskal, Kemandirian daerah dimaksudkan adalah kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan finansialnya dengan menggunakan pendapatan asli daerah, tanpa memiliki ketergantungan yang tinggi pendapatan asli daeraha pendanaan APBN. Ketiga, memperkirakan dampaknya bagi pengurangan kemiskinan daerah, yang didekati dengan Indek pembangunan manusia. Dengan menggunakan analisis efektifitas komponen Pendapatan asli daerah serta analisis regresi diperoleh bahwa tingkat afektifitas penerimaan pendapatan asli daerah secara umum dikategorikan ‘cukup efektif’, dengan rata-rata responsivitas 82 persen. Untuk mengukur tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah digunakan analisis tingkat kemandirian daerah, ditemukan nilai indek ketergantungan 0,089 dengan kategori “instruktif” yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pendapatan asli daeraha kemandirian pemerintah daerah. Sementara dengan menggunakan uji regresi ditemukan penerimaan pendapatan asli daerah memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan di Kota Lhokseumawe. Namun dampak yang diberikan relatif kecil yaitu sebesar 0,07 persen. Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah sebesar satu persen hanya mengurangi kemiskinan sebesar 0,07 persen saja. Penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan d lhokseumawe.

Kata kunci— Fiskal, Rasio Ketergantungan, pendapayan asli daerah, Kemsiskinan.

Abstract--The delegation of authority from the central government to regional governments means there is a budget allocation for the provision of public goods which has the implication of increasing regional government funding for development in each region. However, in practice, decentralization often gives rise to various problems in the regions. A serious problem is the high level of dependence of regional governments on the central government in terms of financial aspects. This research aims, firstly, to measure the level of responsiveness of local original income receipts. In this research, local original income is all income received apart from transfers from the central government, namely regional taxes, levies, Separated Regional Wealth Management Results, other legitimate income and ZIS. Second, measuring regional independence, namely the level of regional dependence on the center on the fiscal side. Regional independence is meant by the region's ability to finance its financial needs using original regional income, without having a high dependence on original regional income on APBN funding. Third, estimate the impact on reducing regional poverty, which is approached by the human development index. By using an analysis of the effectiveness of the original regional income components and regression analysis, it was found that the level of effectiveness of local original income revenues was generally categorized as 'quite effective', with an average responsiveness of 82 percent. To measure the level of financial dependence of regional governments, an analysis of the level of regional independence was used. The dependency index value was found to be 0.089 in the "instructive" category, namely the role of the central government is more dominant than regional original income and the independence of regional governments. Meanwhile, using a regression test, it was found that local revenue had a significant impact on reducing poverty in Lhokseumawe City. However, the impact is relatively small, namely 0.07 percent. An increase in local revenue by one percent only reduces poverty by 0.07 percent. It is important for local governments to increase local revenue to accelerate the reduction of poverty rates in Lhokseumawe.

Keywords— Fiscal, Dependency Ratio, original regional income, poverty

I. PENDAHULUAN

Salah satu konteks pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah adanya alokasi untuk penyediaan barang publik yang berimplikasi pendapatan asli daeraha meningkatnya pendanaan pemerintah daerah terhadap pembangunan di masing – masing daerah. Pemerintah daerah memperoleh dana perimbangan daerah yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), termasuk dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diterima oleh pemerintah Provinsi Aceh. Dana tersebut secara riil telah meningkat sebesar lima kali lipat sejak desentralisasi dimulai. Dengan demikian pemerintah daerah mempunyai kesempatan yang cukup luas

untuk mempercepat pembangunan daerahnya, serta mengurangi Kemiskinan (1).

Pemerintah kota lhokseumawe sebagai salah satu kabupaten kota di Aceh telah menerima limpahan dana dari pemerintah pusat sejak tahun 2008 dalam bentuk dana otunomi khusus. Salah satu tujuan diberikannya dana otonomi adalah untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan dana Penerimaan Asli Daerah, sehingga dapat mengurangi ketergantungan daerah pendapatan asli daeraha dana otonomi dan daerah mampu membiayai pembiayaan daerah dari pendapatan asli daerah. Pemberian dana otonomi bertujuan memberikan ruang fiskal yang lebih luas kependapatan asli daeraha daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Optimalisasi potensi daerah akan membuka

ruang bagi daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakatnya.

Namun dalam praktiknya, desentralisasi tak jarang melahirkan berbagai persoalan di daerah. Permasalahan serius adalah masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dari sisi aspek keuangan. Akibatnya pemerintah daerah kehilangan keleluasaan bertindak dalam mengambil keputusan penting. Tuntutan pembiayaan kegiatan pembangunan yang semakin tinggi, menyebabkan ketergantungan daerah pendapatan asli daerah ruang fiskal juga semakin besar. Permasalahan yang sama juga dialami oleh Kota Lhokseumawe.

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah pendapatan asli daerah sumber pembiayaan eksternal menunjukkan tingkat rasio kemandirian daerah tersebut. Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan transfer) antara lain : Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Pinjaman. Berdasarkan data yang bersumber dari laporan kementerian keuangan dan Bappeda Kota Lhokseumawe, rasio kemandirian Kota Lhokseumawe masih tergolong rendah, rata-rata kemandirian daerah Kota Lhokseumawe berada pendapatan asli daerah angka 6 persen. Meskipun sempat mengalami kenaikan pendapatan asli daerah tahun 2015 dan 2016 mencapai 9 persen, namun rasio kemandirian keuangan daerah kembali menurun (2). Masih rendahnya penerimaan dari pendapatan asli Kota Lhokseumawe ini mencerminkan belum optimalnya perolehan pendapatan dari sumber-sumber potensi yang ada. Oleh karena itu, menarik untuk melihat bagaimana responsivitas pengelolaan keuangan daerah serta tingkat kemandirian daerah serta bagaimana dampaknya bagi penurunan angka kemiskinan.

A. Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian

Secara definitif, kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui anggaran dan belanja negara (3). Seperti halnya anggaran belanja perusahaan maka anggaran belanja negara (daerah) juga terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Secara umum transaksi pemerintah yang tertuang dalam anggaran dan belanja negara (daerah) meliputi: penerimaan baik penerimaan dari pajak maupun penerimaan dari sumber daya alam. Secara khusus bagi daerah dari sisi penerimaan selain penerimaan pajak dan pembagian hasil kekayaan alam juga masih terdapat penerimaan dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa paling sedikit terdapat tiga fungsi utama kebijakan anggaran dan belanja negara (daerah). Fungsi utama adalah fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi (4). Kebijakan

anggaran yang baik memberikan dampak positif untuk membangun berbagai infrastruktur dan membiayai berbagai pengeluaran publik.

B. Desentralisasi Dan Kemiskinan

Desentralisasi dapat dilihat dalam berbagai dimensi, terutama menyangkut aspek fiskal, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan, serta pembangunan sosial dan ekonomi. Desentralisasi merupakan proses transfer kekuasaan dalam membuat keputusan dan kebijakan tentang pembangunan daerah. Desentralisasi merupakan penyerahkannya sebagian atau seluruh wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah-daerah. Sehingga daerah yang menerima kewenangan bersifat otonom, menentukan caranya sendiri berdasarkan prakarsa sendiri secara bebas. Dengan kata lain, desentralisasi adalah berkurangnya atau penyerahkannya sebagian atau seluruh wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah-daerah.

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kependapatan asli daerah pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Menurut (6) desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal harus diikuti oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak (taxing power) [7]. Desentralisasi diharapkan menguatkan keuangan daerah sehingga daerah memiliki keleluasaan dalam meningkatkan kemampuan sumberdaya melalui peningkatan kapasitas masyarakat, dengan demikian akan mampu menurunkan kemiskinan. Selanjutnya (7) desentralisasi fiskal memberikan dampak yang jelas bagi penurunan kemiskinan, meskipun dalam jangka pendek desentralisasi tidak berdampak pendapatan asli daerah penurunan kemiskinan, tetapi dalam jangka panjang memberikan dampak yang signifikan pendapatan asli daerah penurunan kemiskinan, (8)

Secara teori adanya kemampuan pajak, maka pemerintah daerah akan memiliki sumber dana pembangunan yang besar. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah dapat berdampak positif yang akan digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur dan membiayai berbagai pengeluaran public (9). Diera otonomi, salah satu hal yang sangat penting adalah kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan fiskal. (10). kemandirian fiskal memiliki fungsi yaitu Mendorong partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, mendorong pemanfaatan

sumberdaya dan potensi daerah secara optima dan memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah.(11)

C. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah diukur berdasarkan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan bersumber dari dana yang dihasilkan sendiri. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kependapatan asli daerah masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan transfer) antara lain : bagi hasil pajak, bagi hasil pajak bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman.[9] Dalam upaya mendukung kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan fiskal dalam era desentralisasi, maka pemerintah melalui permendagri no 12 tahun 2016 mengklasifikasikan Penerimaan Asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti bagian laba atas penyertaan modal milik daerah, bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik pemerintah, dan bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Kondisi kemampuan daerah dalam memenuhi Pendapatan asli daerah ditentukan oleh beberapa hal (12) pertama. Kondisi awal suatu daerah, kondisi struktur ekonomi daerah menentukan besarnya potensi pendapatan yang akan diterima, disisi lain kondisi sosial masyarakat seperti kesediaan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi. Kedua, ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah, kesediaan pemerintah untuk mencari sumber penerimaan yang potensial. Ketiga, pendapatan perkapita masyarakat, semakin tinggi pendapatan perkapita, maka semakin tinggi kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah, keempat, pertumbuhan penduduk, semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin besar potensi pendapatan yang akan diterima oleh pemerintah. Kelima, inflasi yang terjadi di daerah, jika inflasi di suatu daerah terkendali maka perekonomian akan tumbuh lebih baik, sehingga kemampuan masyarakat dalam membayar pajak juga akan semakin baik. Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan daerah

memenuhi kebutuhan fiskalnya, (13) menjelaskan bahwa kemandirian daerah mempercepat pertumbuhan ekonomi di sumatra selatan, akan tetapi dampak tersebut tidak secara langsung tetapi memerlukan proses waktu yang panjang terutama terkait dengan dampak dari pembiayaan infrastruktur.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Analisis Data

Data dalam penelitian ini akan dianalisis secara kuantitatif. Data dalam penelitian ini adalah data skunder yang bersumber dari BPS dan bappeda kota lhokseumawe yang diambil untuk priode 2018-2022. Data yang digunakan adalah, pertama data pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diterima pemerintah kota lhokseumawe selain yang bersumber dari dana pemerintah pusat, kedua, data PDRB harga berlaku berdasarkan pengeluaran dan ketiga data kemiskinan. Kemiskinan dalam penelitian ini didekati dengan imdek pembangunan manusia, karena nilai ini menjelaskan kemampuan manusia memperbaiki taraf hidup dan perluasan pilihan. Analisis data penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan rasio untuk mengukur responsivitas dan kemandirian fiskal. Selanjutnya akan digunakan analisis regresi untuk melihat dampaknya pendapatan asli daerah pengurangan kemiskinan.

B. Rasio Efectivitas pendapatan asli daerah

Rasio responsivitas bertujuan mengukur upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemungutan pendapatan asli daerah (tax effort). Rasio ini membandingkan penerimaan pendapatan asli daerah dalam tahun berjalan (realisasi) dengan rencana penerimaan yang dibuat pendapatan asli daerah tahun berjalan (target). Rasio efectivitas menggunakan rumus

$$Rasio\ Efectivitas = \frac{Realisasi\ PAD_{it}}{Target\ PAD_{it}} \times 100 \quad (1)$$

Rasio efectivitas berkisar antara 0 sampai 1. Semakin tinggi nilai responsivitas Pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa upaya pungut Pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah juga semakin tinggi, dan sebaliknya.

C. Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh penerimaan asli daerah terhadap pengurangan angka kemiskinan. Pengurangan angka kemiskinan didekati dengan nilai indek pembangunan manusia (IPM).

Model yang digunakan adalah

$$IPM = C + \alpha PAD + \epsilon \quad (4)$$

$$\text{Log}_{IPM} = C + \alpha \text{Log}_{PAD} + \varepsilon \quad (5)$$

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja pendapatan asli daeraha bidang keuangan daerah yang ditentukan melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan selama periode anggaran tertentu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe disusun dengan pendekatan kinerja yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan efisiensi, responsivitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pendapatan Kota Lhokseumawe meliputi semua penerimaan uang yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak Kota Lhokseumawe dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kota Lhokseumawe. Pendapatan Kota Lhokseumawe dikelompokkan atas beberapa komponen, yaitu: Pendapatan asli daerah; Dana Perimbangan; Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pengelolaan keuangan daerah dikatakan efektif jika penerimaan keuangan yang direncanakan pendapatan asli daeraha tahun berjalan memenuhi target yang direncanakan. Kategori efektifitas pengelolaan keuangan sepeti pendapatan asli daeraha tabel 1 dibawah.

Tabel 1. Kategori rasio efectivitas

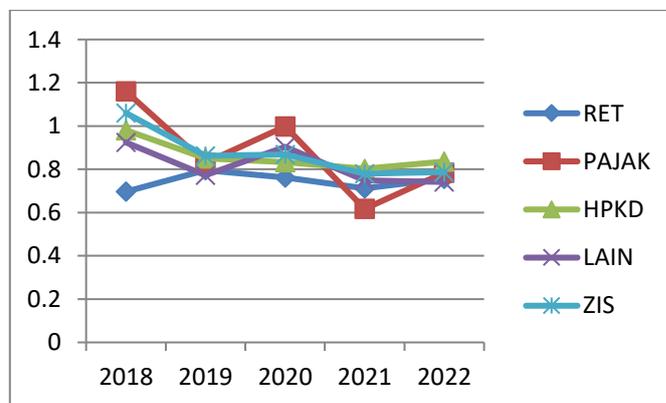
Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian (%)	
Sangat Efektif	> 1
Efektif	>0, 90 - 1
Cukup Efektif	> 0,80 - 0 , 90
Kurang Efektif	> 0,60 - 0 , 80
Tidak Efektif	≤ 0 , 60

Pengukuran efektifitas pengeleloaan keuangan daerah kota lhokseumawe dilakukan dari tahun 2018 sampai 2022. Beberapa komponen pembentuk pendapatan asli daerah yang diukur yaitu Penerimaan Retribusi daerah, pajak daerah hasil pegelolaan kekeyaan daerah yang dipisahkan, lain-lain penerimaan yang sah dan ZIS. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan rencana penerimaan dengan realisasi pendapatan asli daeraha tahun berjalan. Selama tahun 2018 sampai 2022, rasio responsivitas pengelolaan keuangan daerah secara rata-rata berada pendapatan asli daeraha kategori cukup efektif, dengan nilai responsivitas sebesar 0,85 atau nilai responsivitas sebesar 85 persen

Tabel 2. Rasio efectivitas pengelolaan keuanga daerah kota lhokseumawe 2018-2022

Tahun	RASIO						
	Retribusi	PA D	Pajak	HPK D	Lain-lain yg sah	Transfer	ZIS
2018	0,69	1,02	1,16	0,98	0,92	0,91	1,06
2019	0,79	,80	0,83	0,85	0,77	0,95	0,86
2020	0,76	,93	0,99	0,83	0,90	0,95	0,86
2021	0,71	,67	0,61	0,80	0,74	0,98	0,75
2022	0,75	,77	0,78	0,83	0,74	0,97	0,78
Rata	0,74	0,84	0,87	0,86	0,81	0,95	0,87

Rata-rata rasio 0,85 Ini berarti bahwa rencana penerimaan pendapatan asli daerah hanya terealisasi sebesar 85 persen. Jika dilihat dari masing masing komponen pendapatan asli daerah, dari tahun 2018 sampai 2022 tingkat responsivitasnya berfluktuasi. Realisasi penerimaan retribusi daerah terbilang cukup rendah dibandingkan nilai responsivitas komponen yang lain yaitu sebesar 70 persen. Ini berarti penerimaan retribusi efektifitas hanya sebesar 70 persen dan dikategorikan kurang efektif. Rendahnya realisasi penerimaan retribusi diduga karena manajemen retribusi daerah yang belum baik, dimana potensi retribusi belum didata dengan baik. Pengelolaan pajak daerah dari tahun 2018-2022 tergolong cukup efektif. Namun berfluktuasi dan cenderung menurun dari tahun ketahun. Sementara penerimaan yang cukup mendekati rencana anggaran adalah komponen Zakat, infak dan Sadaqah.



Gambar 1. Rasio efectivitas pengelolaan keuangan daerah kota lhokseumawe 2018-2022

B. Dampak Pendapatan asli daerah Terhadap Pengurangan Kemiskinan.

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi batas minimum. Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat disuatu daerah seringkali disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaan pendapatan daerah. (1) pengujian dengan menggunakan regresi untuk

tahun 2012-2022 diperoleh hasil signifikan pendapatan asli daerah nilai kebebasan 5 persen.

Tabel 4. Dampak pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan

Variabel	coeficient	t- statistik	Prob
C	4.320933	542.0781	0.0000
Log_PAD	-0.078113	-1.841165	0.0987
R-squared	0.273601		

Pendapatan asli daerah memberikan dampak yang negatif dan signifikan pendapatan asli daerah pengurangan kemiskinan. Peningkatan pendapatan asli daerah 1 (satu) persen akan mengurangi angka kemiskinan sebesar 0,07 persen. Dilihat dari nilai determinan dalam pengujian ini, bahwa pengurangan kemiskinan dikota lhokseumawe hanya sebesar 27 persen dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Penurunan angka kemiskinan dikota lhokseumawe karena peningkatan pendapat daerah tergolong sangat kecil, hal ini memperlambat penuntasan kemiskinan dikota lhokseumawe. Jika kota lhokseumawe mengandalkan pembiayaan daerah hanya bersumber dari pendapatan asli daerah maka penurunan angka kemiskinan akan membutuhkan waktu yang cukup lama

IV. KESIMPULAN

Dari pembahasan pendapatan asli daerah bagian hasil dapat ditarik beberapa hal yang penting. Pengelolaan keuangan daerah dikatakan efektif jika penerimaan keuangan yang direncanakan pendapatan asli daerah tahun berjalan memenuhi target yang direncanakan. Selama tahun 2018 - 2022, rasio responsivitas pengelolaan keuangan daerah secara rata-rata berada kategori 'cukup efektif', dengan nilai responsivitas sebesar 0,85. Nilai responsivitas yang paling kecil terdapat pendapatan asli daerah komponen retribusi daerah hanya terealisasi sebesar 70 persen dari yang direncanakan. Rendahnya realisasi retribusi daerah disebabkan pengelolaan retribusi dikota Lhokseumawe tergolong kurang efektif. Sementara tingkat kemandirian daerah kota Lhokseumawe masih sangat rendah dan tergolong dalam kategori instruktif. Rendahnya tingkat kemandirian daerah menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan kota Lhokseumawe pendapatan asli daerah pemerintah pusat masing sangat tinggi dai sisi fiskal. Pembiayaan infrastruktur dan lainnya masih dominan bersumber dari pemerintah pusat dibandingak dari pendapatan asli daerah. Dilihat dari sisi dampat meningkatnya pendapatan pendapatan asli daerah pengurangan kemiskinan, bahwa peningkatan pendapatan asli daerah memberikan dampak yang signifikan pendapatan asli daerah pengurangan kemiskinan, meskipun dampaknya sangat kecil. Jika pemerintah daerah hanya mengandalkan pendapatan asli daerah untuk menuntaskan kemiskinan maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Pemerintah daerah perlu memikirkan rencana strategis untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dengan menggali sumber-sumber penerimaan dan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

REFERENSI

1. Busra B, Masbar R, Agussabti A, Nasir M. Does Government Responsibility and Social Capital Empower the Poor in Aceh, Indonesia? In: Proceedings of the 1st Aceh Global Conference

(AGC 2018) [Internet]. Paris, France: Atlantis Press; 2019. p. 238–333. Available from: www.atlantis.press.com

2. Kuncoro, Mudrajad. 2002. Spatial and Regional Analysis: Study of Agglomeration and Industrial Clusters of Indonesia. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

4. Gebremeskel, H. G., Tesfa, G. G., & Randall, W. J. (2004). the role of small business in economic growth and poverty alleviation in west virginia: An empirical analysis. In American Economics Association Annual Meeting.

5. Al-Rawashdeh, S. T. (2011). The Effect of Small-Scale Industry on Local Development Case Study: Karak Governorate. Canadian Social Science, 7(6), 264-271.

6. Brata, A. G. (2009). Spatial concentration of the informal small and cottage industry in Indonesia. ASEAN Economic Bulletin, 215-226.

7. How the Poor Survive From Vulnerability, A Study of Poor Households in Aceh, Indonesia : 2021;648(ICoSPOLHUM):131–6.

8. Abdillah, K., & Mursinto, D. (2016). The effects of fiscal decentralitation, economic growth and income inequality on poverty rate of Indonesia's 3 provinces. International Journal of Advanced Research, 4(2), 405-414.

9. Gokan, T., Kuroiwa, I., & Nakajima, K. (2019). Agglomeration economies in Vietnam: A firm-level analysis. Journal of Asian Economics, 62, 52-64.

10. Arimoto, Y., Nakajima, K., & Okazaki, T. (2014). Sources of productivity improvement in industrial clusters: The case of the prewar Japanese silk-reeling industry. Regional Science and Urban Economics, 46, 27-41

11. Busra, B, Masbar R, Sabti A, Nasir M. Social Capital and Survival Strategies of the Poor in the Rural Community in Aceh, Indonesia. Int J Academic Research in Economic and Management Science. 2018;7(4):78–88.

12. Collier, Paul. (2007). The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done about It. Oxford: Oxford University Press.

13. Saputra, B., Amzar, Y. V., & Prihanto, P. H. (2016). Analisis pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di provinsi jambi. Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah, 10(2).